

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Asshiddiqie, Jimly, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006).
- _____, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara).
- Fuady, Munir, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat) (Bandung:PT Refika Aditama, 2009)
- Ibrahim, Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,(Malang: Bayumedia Publishing,2011).
- Isharyanto, Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia), (Yogyakarta : Deepublish, 2016),
- Khaleed, Badriyah, Mekanisme Judicial Review (Jakarta Selatan: PT Buku Seru, 2015)
- MD, Moh. Mahfud, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi(Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- _____, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta:Gama Media, 1999
- _____, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010)
- Nazir, Mohamad, Metode Penelitian, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003)
- Redaksi Great Publisher, Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintah, dan Ketatanegaraan, (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2009)

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta :UI-Press, 1986).

Thalib, Abdul Rasyid, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

Jurnal

Abdul Aziz Nasihudin, Implementasi Hak Uji Materiil Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Mahkamah Agung dan Pengaruhnya terhadap Pemberdayaan Daerah, Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 Nomor 3 (Purwokerto, 2013)

Baharudin, Desain Daerah Khusus/Istimewa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Volume 45 Nomor 2, (Semarang, 2016)

Mahmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundnag-undangan, Jurnal konstitusi volume 7 Nomor 5 (Jakarta, 2010).

Muhammad Siddiq Armia, Eksekutif review terhadap Perda Retribusi di Daerah Otonomi Khusus, Jurnal Rechtsvinding Volume 5, Nomor 2 (Jakarta, 2016)

Musakkir, Fungsi Peraturan Daerah Sebagai Alat Perubahan Sosial, Jurnal Amanna Gappa Volume 13 Nomor 3 (Jakarta, 2005)

Nur Solikhin, Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Perda; Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif Dan Pelaksanaan Uji Materiil MA, Jurnal Rechtsvinding (__, 2017)

Rian Van Farits Kapitan, Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Volume 44 Nomor 4, (Semarang, 2015)

Umbu Rauta, Praktik Pengawasan Raperda dan Perda Serta Upaya Rekonstruksi Pengujiannya Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Volume 44 Nomor 1, (Semarang, 2015)

Yuri Sulisty, dkk. Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Jurnal Lentera Hukum Volume I Nomor 1, (Jember, 2014).

Zihan syahayani, Siapa berwenang membatalkan perda?, Jurnal Update Indonesia Volume X Nomor 4, (Jakarta, 2014).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Daerah

Instruksi Mendagri Nomor : 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2016

Surat Edaran Mendagri Nomor 188.34/1586/SJ perihal Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah

Website

Mahkamah Agung, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <https://mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2017

Fachri Fachrudin, *Putusan MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda Provinsi*, <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/14/22392261/putusan.mk.cabut.kewenangan.mendagri.batalkan.perda.provinsi> diakses tanggal 6 september 2017

_____, MA Siap Terima Dampak Putusan MK Terkait Pembatalan Perda, <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/15/15280191/ma.siap.terima.dampak.putusan.mk.terkait.pembatalan.perda>. Diakses pada 8 November 2017

Tanpa nama, *Mendagri sayangkan keputusan MK cabut Kewenangan Batalkan Perda*, <http://www.kemendagri.go.id/news/2017/04/06/mendagri-sayangkan-keputusan-mk-cabut-kewenangan-batalkan-perda> diakses tanggal 6 september 2017

Tanpa nama, *Praktik Judicial Review dan Legislative review di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1105/praktik-legislative-review--judicial-review-di-republik-indonesia>, diakses pada 6 november 2017